



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

PROFIL GENDER & ANAK

**KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

2022



PROFIL DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2022

TIM PENYUSUN

**Siswanto, S.ST
Arum Purbowati, S.ST
Yasir Wijaya, S.Si., M.Si
Probowati Dwi Cahyani, S.Si
Dra. Handi Mulyaningsih., M.Si**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLIDUNGAN ANAK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2022**

KATA PENGANTAR

Kebijakan dan program pembangunan masa kini dihadapkan pada tuntutan ramah anak dan perempuan dalam setiap tahapannya. Seluruh pemangku kepentingan harus mengutamakan perspektif gender dan kondisi terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan yang dilahirkan, terutama ditengah perjuangan kita melewati pandemi global Covid-19. Langkah pertama dari proses itu adalah penyediaan data dan informasi yang tepat tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki serta anak.

Buku ini berisi informasi mengenai isu dan analisis gender serta anak. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak.

Hadirnya buku ini diharapkan bisa menjadi isu pemantik dan bahan awal bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah.

Lampung Tengah, Juni 2022
Bupati Lampung Tengah

H. Musa Ahmad, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	2
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	3
D. SUMBER DATA.....	4
BAB II PENYAJIAN DATA TERPILAH.....	5
A. DATA GENDER BIDANG DEMOGRAFI.....	5
B. DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN.....	16
C. DATA GENDER BIDANG KESEHATAN.....	21
D. DATA GENDER BIDANG HUKUM DAN HAM.....	32
E. DATA GENDER BIDANG EKONOMI.....	38
F. DATA GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN.....	44
H. DATA TERPILAH ANAK.....	49
BAB III PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kependudukan Menurut Kecamatan, 2021	6
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin, 2021	9
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Generasi, 2021	12
Tabel 4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2021	15
Tabel 5. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2021	18
Tabel 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021.....	19
Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021.....	20
Tabel 8. Angka Partisipasi Murni (APM), Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021.....	20
Tabel 9. Angka Harapan Hidup Lampung Tengah	22
Tabel 10. Angka Kesakitan di Kabupaten Lampung Tengah.....	24
Tabel 11. Angka Kematian Ibu	25
Tabel 12. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan	25
Tabel 13. Cakupan Pertolongan Persalinan	26
Tabel 14. Kontrasepsi yang Digunakan	26
Tabel 15. Kepemilikan Kartu Imunisasi	28
Tabel 16. Jenis Imunisasi yang Diperoleh	28
Tabel 17. Jumlah Pemberian Imunitas Tetanus Toxoid	29
Tabel 18. Pemberian Tablet Zat Besi	30
Tabel 19. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Lampung Tengah	30
Tabel 20. Jumlah Tenaga Kesehatan.....	31
Tabel 21. Jumlah Korban Kekerasan Seksual	32
Tabel 22. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban	33
Tabel 23. Jenis Pelayanan yang Diterima Korban	33

Tabel 24. Pendidikan Pelaku Kekerasan	34
Tabel 25. Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban	34
Tabel 26. Pendidikan Korban Kekerasan	35
Tabel 27. Jumlah Korban Kekerasan Seksual	35
Tabel 28. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban	36
Tabel 29. Jenis Pelayanan yang Diterima Korban	36
Tabel 30. Pendidikan Pelaku Kekerasan	37
Tabel 31. Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban	37
Tabel 32. Pendidikan Korban Kekerasan	38
Tabel 33. Jumlah Pencari Kerja Kabupaten Lampung Tengah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2021	39
Tabel 34. Jumlah Pelaku dan Pekerja IMKM Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021	40
Tabel 35. Jumlah Pengurus dan Anggota Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021	40
Tabel 36. Jumlah Anggota Kelompok Tani dan PPL Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021	41
Tabel 37. Jumlah Petani Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021	42
Tabel 38. Jumlah Pengurus Kelembagaan Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021	43
Tabel 39. Jumlah Pengurus Partai dan Anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin	43
Tabel 40. Jumlah Penyandang Disabilitas, Pemulung, Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin	44
Tabel 41. Jumlah Pengurus Partai dan Anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin	45
Tabel 42. Rekapitulasi PNS Lampung Tengah Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin, 2021	45
Tabel 43. Jumlah Anggota DPRD Menurut Parpol dan Jenis Kelamin	46

Tabel 44. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2021.....	48
Tabel 45. Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Lampung Tengah.....	53
Tabel 46. Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2021 per Kecamatan	56
Tabel 47. Jumlah Kekerasan Anak Usia Kurang dari 18 Tahun, dan Jumlah Kekerasan Anak Usia 18-25 Tahun Kabupaten Lampung Tengah, 2021.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Gambar 2. Piramida Penduduk Lampung Tengah, 2021.....	12
Gambar 3. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin.....	23
Gambar 4. Pemberian ASI untuk Baduta	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Pada tahun 2000 Presiden RI, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Berikutnya diperlukan perencanaan yang berbasis responsif gender karenanya dalam waktu yang tidak lama dikeluarkan kebijakan PPRG.

Upaya mewujudkan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dibutuhkan data terpilah. Akan tetapi Kabupaten Lampung Tengah belum tersedia data terpilah gender yang akan menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Lampung Tengah dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Lampung Tengah atau juga disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Oleh karena itu Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Lampung Tengah melalui Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah perlu menyusun buku Profil Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

B. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Buku Publikasi Statistik Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah 2022, antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik dan indikator gender, anak dan perempuan bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Meningkatkan ketersediaan data statistik dan analisis gender, anak dan perempuan sekaligus sosialisasinya di kalangan pembuat kebijakan.

- c. Meningkatkan komitmen untuk menggunakan data statistik gender dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Data yang dihasilkan dalam penyusunan Buku Publikasi Statistik Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 berguna sebagai salah satu alat untuk perencanaan pembangunan yang akan datang, evaluasi masa kini dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa yang lalu.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam 3 (tiga) bab, yang terdiri dari:

Bab I, Pendahuluan yang mencakup latar belakang penulisan dan tujuan.

Bab II, Penyajian Data terpilah yang terdiri dari:

- A. Data Gender Demografi
- B. Data Gender Pendidikan
- C. Data Gender Kesehatan
- D. Data Gender Ekonomi
- E. Data Gender Pemerintahan dan Politik
- F. Data Gender Bidang Hukum dan Ham
- G. Data Gender Bidang Sosial dan Masyarakat
- H. Data Terpilah Anak

Bab III, Penutup yang merupakan berisi kesimpulan

D. SUMBER DATA

Dalam penyusunan publikasi statistik gender dan anak diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin, yang dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Tengah, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Kementerian Agama Lampung Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II

PENYAJIAN DATA TERPILAH

A. DATA GENDER BIDANG DEMOGRAFI

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Selain sebagai subyek pembangunan, dimana penduduk berperan sebagai penggerak pembangunan, penduduk juga merupakan obyek pembangunan. Ini berarti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya dapat dinikmati hasilnya bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan kondisi kependudukan, termasuk didalamnya kapasitas penduduknya.

Jumlah penduduk dikaitkan dengan struktur, komposisi, serta persebaran penduduk menjadi informasi penting yang berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan yang potensial, akan tetapi jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi beban pembangunan dan memicu munculnya permasalahan terkait penyediaan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang serta perumahan. Untuk itu peningkatan jumlah penduduk semestinya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik pendidikan maupun kesehatan sehingga tidak menjadi beban pembangunan.

Bila dilihat potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur maupun sebaran antar wilayahnya. Oleh karena itu berikut akan diuraikan mengenai karakteristik dan perkembangan penduduk Kabupaten Lampung Tengah.

1. Karakteristik Penduduk

Dari sisi jumlah penduduk, penduduk Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penduduk paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Indikator Kependudukan Menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2021	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padang Ratu	63,461	2.65	4.30%	386.96	107.06
2. Selagai Lingga	40,431	2.34	2.74%	148.30	105.17
3. Pubian	54,494	2.70	3.69%	290.79	104.47
4. Anak Tuha	48,599	2.92	3.29%	298.74	104.48
5. Anak Ratu Aji	20,164	2.47	1.36%	287.15	104.15
6. Kalirejo	77,798	1.93	5.27%	695.25	105.92
7. Sendang Agung	46,543	2.33	3.15%	475.41	105.59
8. Bangun Rejo	71,077	2.29	4.81%	677.70	104.55
9. Gunung Sugih	78,957	2.18	5.34%	481.42	105.45
10. Bekri	31,743	2.13	2.15%	337.15	106.06
11. Bumi Ratu Nuban	35,955	2.13	2.43%	564.35	103.87
12. Trimurjo	59,266	1.75	4.01%	923.43	103.78
13. Punggur	42,568	1.52	2.88%	701.29	102.83

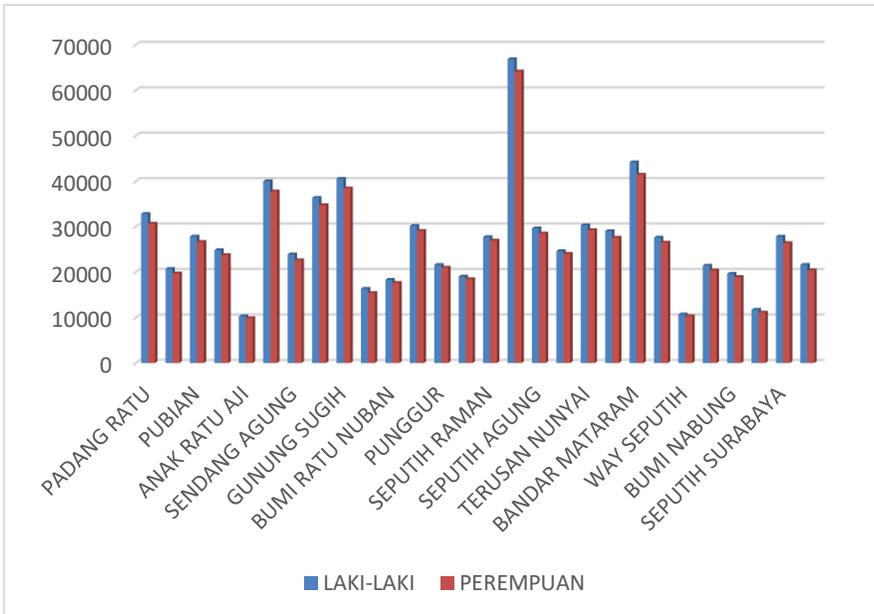
Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2021	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Kota Gajah	37,504	1.54	2.54%	799.66	103.20
15. Seputih Raman	54,672	1.59	3.70%	420.55	102.78
16. Terbanggi Besar	131,019	1.79	8.87%	603.36	104.21
17. Seputih Agung	58,162	2.14	3.94%	543.77	103.96
18. Way Pengubuan	48,671	2.52	3.29%	226.93	102.50
19. Terusan Nunyai	59,549	2.69	4.03%	205.56	103.70
20. Seputih Mataram	56,621	1.95	3.83%	488.28	105.15
21. Bandar Mataram	85,627	1.53	5.80%	84.12	106.60
22. Seputih Banyak	54,088	2.38	3.66%	395.90	104.25
23. Way Seputih	20,991	1.97	1.42%	336.72	103.64
24. Rumbia	41,796	2.00	2.83%	353.04	105.16
25. Bumi Nabung	38,565	2.06	2.61%	394.53	103.80
26. Putra Rumbia	22,830	2.55	1.55%	244.48	105.69
27. Seputih Surabaya	54,237	1.84	3.67%	383.16	105.30
28. Bandar Surabaya	42,007	2.34	2.84%	304.20	106.02
Lampung Tengah	1,477,395	2.11	100.00%	325.02	104.69

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Dapat dilihat pada Tabel 1, berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 adalah 1,477,395 Jiwa, sebesar 16.27 persen dari total penduduk Provinsi Lampung yang mencapai 9.08 juta jiwa. Dilihat dari sebaran penduduk Kecamatan Terbanggi Besar merupakan penduduk yang terbanyak di Lampung Tengah sebesar 8.87 persen atau 131,019 jiwa penduduk yang berada disana, selanjutnya terbanyak kedua di Kecamatan Bandar Mataram sebesar 5.80 persen atau 85,627

jiwa dan penduduk terbanyak urutan ketiga berada di Kecamatan Gunung Sugih sebesar 5.34 persen atau 78,957 jiwa penduduknya.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah selama 11 tahun, dari 2010 ke 2021 tidak sampai 1 persen per tahunnya yaitu sebesar 2.11 selama 11 tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program KB yang dicanangkan pemerintah.

Dari kepadatan penduduk Kecamatan Trimurjo merupakan kecamatan yang paling terpadat diantara kecamatan lain yang

berada di Lampung Tengah sebesar 923.43, artinya bahwa dalam 1 km² dihuni penduduk sebanyak 923 jiwa. Kecamatan terpadat kedua berada di kecamatan Kota Gajah sebesar 799.66 atau dengan kata lain 1 km² di Kota Gajah dihuni penduduk 799 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan terpadat yang ketiga yaitu berada di Kecamatan Punggur dengan nilai 701.29 yang memiliki arti untuk 1 km² di Kecamatan Punggur ditempati penduduk 701 jiwa.

Dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk, pada tahun 2021 rasio jenis kelamin penduduk Lampung Tengah sebesar 104.69. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin, 2021

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
PADANG RATU	32812	30649	63461
SELAGAI LINGGA	20725	19706	40431
PUBIAN	27843	26651	54494
ANAK TUHA	24832	23767	48599
ANAK RATU AJI	10287	9877	20164
KALIREJO	40017	37781	77798
SENDANG AGUNG	23904	22639	46543
BANGUNREJO	36329	34748	71077
GUNUNG SUGIH	40525	38432	78957
BEKRI	16338	15405	31743

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
BUMI RATU NUBAN	18319	17636	35955
TRIMURJO	30183	29083	59266
PUNGGUR	21581	20987	42568
KOTA GAJAH	19047	18457	37504
SEPUTIH RAMAN	27711	26961	54672
TERBANGGI BESAR	66859	64160	131019
SEPUTIH AGUNG	29646	28516	58162
WAY PENGUBUAN	24636	24035	48671
TERUSAN NUNYAI	30316	29233	59549
SEPUTIH MATARAM	29021	27600	56621
BANDAR MATARAM	44182	41445	85627
SEPUTIH BANYAK	27607	26481	54088
WAY SEPUTIH	10683	10308	20991
RUMBIA	21424	20372	41796
BUMI NABUNG	19642	18923	38565
PUTRA RUMBIA	11731	11099	22830
SEPUTIH SURABAYA	27818	26419	54237
BANDAR SURABAYA	21617	20390	42007
LAMPUNG TENGAH	755635	721760	1477395

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

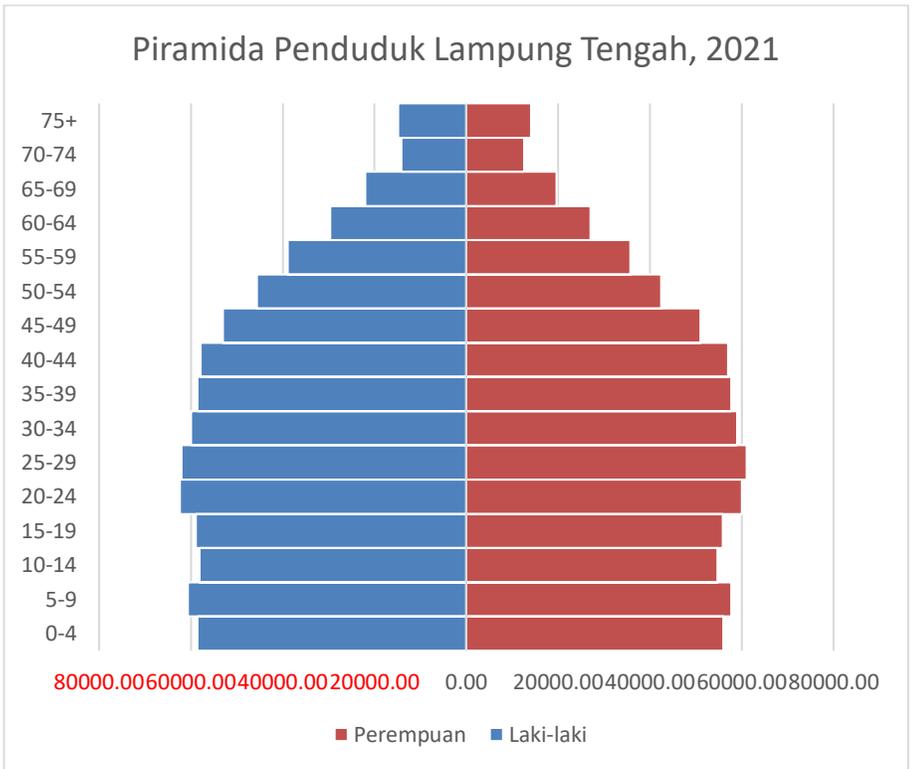
Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang berjenis kelamin laki- laki sebanyak 755,635 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 721,760 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 adalah 104.69.

Selain berdasarkan jenis kelamin, struktur penduduk juga dapat dilihat berdasarkan umur. Struktur umur penduduk sangat

penting untuk menjadi dasar perencanaan pemerintah dalam segala bidang pembangunan termasuk dalam bidang bisnis. Pengetahuan mengenai struktur umur penduduk di suatu wilayah diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan yang pasti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu contoh misalnya jika penduduk suatu wilayah banyak yang termasuk dalam kelompok umur balita maka kebutuhan akan fasilitas kesehatan balita dan peningkatan gizi akan menjadi hal yang sangat penting. Contoh lain adalah jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk berusia sekolah dasar yang cukup besar maka pembangunan akan dapat lebih dikonsentrasikan untuk membangun sarana dan prasarana untuk pendidikan sekolah dasar sehingga tidak lagi salah sasaran misalnya dengan membangun sarana dan prasarana untuk pendidikan tingkat lanjutan.

Selain itu juga kita dapat melihat angka beban ketergantungan suatu wilayah. Angka beban ketergantungan adalah rasio antara jumlah penduduk non produktif dengan jumlah penduduk produktif. Angka beban ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan penduduk usia produktif atas penduduk usia non produktif. Semakin besar angka keertgantungan semakin besar beban penduduk usia produktif. Secara ekonomi, hal ini juga menggambarkan beban ekonomi penduduk yang bekerja terhadap penduduk yang belum bekerja atau tidak bekerja lagi.

Gambar 2. Piramida Penduduk Lampung Tengah, 2021



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

3. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Generasi, 2021

Tahun 2021	Laki-laki	Persentase	Perempuan	Persentase
Usia Muda	177459	23.48%	168442	23.34%
Usia Produktif	527175	69.77%	506987	70.24%
Usia Lanjut	51001	6.75%	46331	6.42%
Dependency Ratio	43.34	100%	42.36	100%

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dari perbandingan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka didapat angka ketergantungan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 untuk laki-laki yaitu sebesar 43.34 persen. Artinya dari 100 penduduk laki-laki yang produktif harus menanggung beban 43 penduduk laki-laki non produktif. Sedangkan untuk beban ketergantungan perempuan yaitu sebesar 42.36 persen, artinya dari 100 penduduk perempuan yang produktif harus menanggung beban 42 penduduk perempuan non produktif. Selain itu, angka ini menunjukkan juga bahwa Kabupaten Lampung Tengah sudah memasuki masa bonus demografi.

Menurunnya angka beban ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif.

Jika kecenderungan penurunan angka beban ketergantungan terus berlangsung, maka diharapkan Lampung Tengah segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah (*windows of opportunity*).

Angka beban ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif. Seperti diketahui bahwa bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Lampung Tengah adalah usia angkatan kerja 15-64 tahun, dimana penduduk pada kelompok ini menjadi potensial bagi Lampung untuk menjadi provinsi maju apabila sumber daya manusianya berkualitas. Sebaliknya, menjadi bumerang jika kualitas sumber daya manusia penduduk produktif itu rendah (*Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035*).

4. Status Perkawinan

Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda atau duda. Penduduk menurut status perkawinan dibedakan menjadi 3 yaitu belum kawin, kawin dan cerai (cerai mati dan cerai hidup). Tinggi rendahnya angka penduduk menurut status perkawinan secara tidak langsung dipengaruhi oleh struktur umur, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya penduduk di suatu wilayah.

Tabel 4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2021

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	33.43	63.58	2.99	100.00
Perempuan	23.76	66.48	9.76	100.00
Lampung Tengah	28.69	65.00	6.31	100.00

*) Termasuk cerai hidup dan cerai mati

Di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 terdapat 1,244,325 penduduk yang berumur 10 tahun ke atas atau 84.22 persen dari total penduduk di Kabupaten Lampung Tengah. Sebanyak 71.39 persen penduduk Lampung Tengah status perkawinan nya sudah kawin atau pernah kawin baik cerai hidup maupun cerai mati. Dari Tabel 4, diketahui bahwa terdapat perbedaan komposisi antara laki-laki dan perempuan menurut status perkawinan. Hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah informasi mengenai angka perceraian (cerai mati) perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki laki. Hal ini bisa diartikan bahwa kaum perempuan lebih memilih tetap menjanda setelah ditinggal mati oleh suaminya. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain umur perkawinan

muda, latar belakang pendidikan, ekonomi keluarga, aktivitas wanita di luar rumah yang tinggi, dan lain-lain.

B. DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Nasional karena melalui bidang pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan juga mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam diri seseorang dalam berkarya dan bermasyarakat. Pendidikan juga secara tidak langsung mempengaruhi relasi gender yang lebih harmonis. Rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati serta mendorong rasa kerjasama antara perempuan dan laki-laki serta menghapus budaya kekerasan melalui kebijakan demokratisasi di bidang pendidikan.

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis. Menurut UNESCO, melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca

huruf latin dan huruf lainnya. AMH dapat menunjukkan sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Selain itu AMH juga dapat dijadikan indikator untuk melihat keberhasilan program-program pemerintah dalam memberantas buta huruf. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna memberantas buta huruf, antara lain adalah dengan adanya program Kejar Paket A dan B yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya yang tinggal di daerah perdesaan.

Berdasarkan data Susenas tahun 2021, Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah adalah 96.36 persen, artinya dari 100 penduduk masih ada 3-4 orang yang belum bisa membaca. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam rangka mengentaskan buta huruf yang masih ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, AMH perempuan lebih rendah yaitu 94.87 persen dari laki-laki sebesar 97.82 persen namun selisihnya tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender pada bidang pendidikan dilihat dari indikator angka melek huruf sudah lebih baik. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan sudah mendapatkan pendidikan yang layak.

Kemudian jika dilihat berdasarkan karakteristik pengeluaran keluarga, persentase angka melek huruf tertinggi yaitu 99.12 persen terdapat pada karakteristik keluarga yang memiliki pengeluaran 20 persen teratas, dengan kecenderungan berpendapatan tinggi. Hal ini bisa diakibatkan karena dengan pendapatan yang tinggi, rumah tangga tersebut mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi. Sedangkan, keluarga yang berpenghasilan rendah, memiliki keterbatasan dalam menyekolahkan anggota keluarganya karena kurangnya biaya yang dimiliki untuk bersekolah. Hal ini juga sejalan dengan persentase kemampuan membaca anak untuk huruf latin dan huruf lainnya berdasarkan karakteristik kelompok pengeluaran.

Tabel 5. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2021

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya*
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	97.82	51.27
Perempuan	94.87	51.13
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	93.73	48.48
40 Persen Tengah	97.38	52.21
20 Persen Teratas	99.12	54.11
Lampung Tengah	96.36	51.20

* Huruf lainnya yaitu selain huruf latin.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu

jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Adapun angka partisipasi kasar tingkat SD/MI/Paket A laki-laki lebih tinggi yaitu 106.24 persen sedangkan perempuan 105.51 persen, di tingkat SLTP/MTS/Paket B laki-laki lebih tinggi yaitu 92,41% sedangkan perempuan 91,43% sedangkan di tingkat SLTA/SMK/MA/Paket C partisipasi perempuan lebih tinggi yaitu 98,71% sedangkan laki-laki hanya 91,29%. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APK			
SD	106.24	105.51	105.90
SMP	92.41	91.43	91.91
SMA	91.29	98.71	94.88

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan, grafik dibawah ini menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI dan SLTP/MTS perempuan lebih tinggi persentasinya yaitu 100 persen tingkat SD/MI dan 99.01 persen tingkat SLTP/MTS, dibandingkan dengan laki-laki yaitu 99.70 persen, SD/MI dan 94.01 persen tingkat SLTP/MTS sedangkan di tingkat SLTA/MA/SMK laki-laki lebih tinggi sedikit yaitu 70.81 persen dan perempuan memiliki persentasi 70 persen hampir sama tidak begitu selisih signifikan.

Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	99.70	100.00	99.84
13 – 15 tahun	94.01	99.01	96.54
16 – 18 tahun	70.81	70.00	70.42

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 8. Angka Partisipasi Murni (APM), Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)

APM			
SD	99.70	99.66	99.69
SMP	74.23	76.30	75.28
SMA	57.72	54.56	56.19

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

C. DATA GENDER BIDANG KESEHATAN

Di Indonesia, gender menjadi determinan kesehatan penting bagi perempuan dan laki-laki. Norma, peran, dan hubungan gender berinteraksi dengan faktor-faktor biologis, yang memengaruhi paparan pada penyakit dan risiko kesehatan buruk. Karena itu, kebijakan kesehatan perlu menimbang perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Penyesuaian kebijakan dan program kesehatan dengan pertimbangan perbedaan dan tren ini dapat meningkatkan dampak positif, mengurangi ketidakmerataan kesehatan, dan mendukung terwujudnya hak kesehatan bagi semua.

Isu kesehatan merupakan indikator penting dalam proses pembangunan manusia. Kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan di luar sektor kesehatan, seperti kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan keamanan fisik. Ketidaksetaraan gender merupakan suatu determinan kesehatan penting dan tetap menjadi tantangan, seperti di tempat-tempat lain. (*World Health Organization (WHO), 2021*)

Tujuan utama pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah untuk mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu kesehatan juga termasuk salah satu hak dasar masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Faktor pembangunan kesehatan ini berimplikasi secara langsung kepada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama.

Pada bab ini, selanjutnya akan disajikan serta dipaparkan berbagai data kondisi pembangunan bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Data yang ditampilkan juga disertai dengan data terpilah gender, sehingga diketahui berbagai permasalahan gender baik kesetaraan maupun ketimpangan yang terjadi dalam akses, peran, kontrol maupun manfaat dalam bidang kesehatan.

1. Angka Harapan Hidup

Tabel 9. Angka Harapan Hidup Lampung Tengah

Tahun	AHH (tahun)
2018	69.46
2019	69.75
2020	69.84
2021	69.87

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Di Kabupaten Lampung Tengah Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan angka yang terus naik, hal ini menunjukkan bahwa kesehatan penduduk Kabupaten Lampung Tengah semakin baik. Jika Angka Harapan Hidup nilainya rendah, maka perlu adanya program pembangunan kesehatan, ataupun diadakan program sosial untuk peningkatan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Jika melihat angka harapan hidup berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Jika melihat grafik tersebut, angka harapan hidup untuk penduduk berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan angkanya naik dari tahun ke tahun. Untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki angka harapan hidup di tahun 2021

sebesar 67.84 tahun dan angka harapan hidup perempuan di tahun 2021 sebesar 71.81.

2. Angka Kesakitan

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang menderita sakit terhadap total penduduk. Keluhan kesehatan yang sering dialami mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya).

Tabel 10. Angka Kesakitan di Kabupaten Lampung Tengah

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	18.64
Perempuan	10.02
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	13.06
40 Persen Tengah	14.35
20 Persen Teratas	17.22
Kab. Lampung Tengah	14.41

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Pada tabel 10, sebanyak 14.41 persen penduduk Kabupaten Lampung Tengah mengalami keluhan kesehatan. Penduduk

berjenis kelamin laki-laki lebih sering mengalami keluhan kesehatan dibandingkan perempuan. Kelompok pengeluaran 20 persen teratas ternyata lebih banyak mengalami keluhan kesehatan dibandingkan 40 persen terbawah pengeluarannya, atau 4.16 persen lebih tinggi dan sering mengalami keluhan kesehatan.

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Tabel 11. Angka Kematian Ibu

Uraian	
Angka kematian ibu melahirkan	35
Jumlah kematian ibu melahirkan	1
Jumlah kematian ibu hamil	19
Jumlah kematian ibu bersalin	1
Jumlah kematian ibu nifas	18

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Jumlah kematian ibu hamil di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 19 kematian, sedangkan kematian ibu nifas sebanyak 18 kematian. Untuk jumlah kematian ibu hamil dan bersalin masih sangat rendah yaitu masing-masing sebanyak 1 kematian saja

4. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Tabel 12. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Penyebab	Jumlah
Patrus lama	0
Infeksi	3
Hipertensi	4
Perdarahan	9
Lainnya	22

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Pada tabel tersebut, penyebab kematian ibu melahirkan terbanyak adalah penyebab lainnya yang tidak termasuk kategori diatas. Perdarahan menjadi penyebab kematian kedua terbanyak yaitu jumlahnya 9.

5. Cakupan Pertolongan Persalinan

Tabel 13. Cakupan Pertolongan Persalinan

Uraian	Persentase
Cakupan pertolongan persalinan	83.94

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Cakupan pertolongan persalinan yang dimaksud adalah pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dimana 83.94 persen kejadian persalinan berhasil sukses ditangani. Semakin tinggi angka pertolongan persalinan kemungkinan angka kematian ibu melahirkan semakin kecil.

6. Keluarga Berencana

Tabel 14. Kontrasepsi yang Digunakan

Jenis Kontrasepsi	Jumlah
IUD	152
MOP	1
MOW	1
Implant	571
Suntik	17464
Pil	2081
Kondom	266
Obat vagina	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) yang paling banyak digunakan jenisnya suntik, jumlahnya sebesar 17464. Pil merupakan penggunaan kontrasepsi terbanyak kedua yaitu 2081, kemudian implant digunakan oleh sebanyak 571 orang yang merupakan penggunaan kontrasepsi terbanyak ketiga.

7. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Gambar 4. Pemberian ASI untuk Baduta



Sumber : Susenas 2021, BPS Kabupaten Lampung Tengah

Pemberian ASI sangat penting untuk menjaga imunitas atau kekebalan bayi atau balita. ASI eksklusif sebaiknya diberikan hingga 6 bulan pertama. Selain ASI, makanan pendamping ASI (MPASI) juga perlu diberikan untuk mencukupi gizi bayi atau balita.

Dari grafik diatas untuk baduta di Kabupaten Lampung Tengah yaitu 95.58 persen baduta sudah diberi ASI oleh ibu. Kesadaran ibu akan pentingnya ASI sangat tinggi. Selain ASI, adanya program

imunisasi sejak dini akan meningkatkan imunitas bayi atau balita, sehingga bayi atau balita tidak mudah terserang penyakit.

8. Kepemilikan Kartu Imunisasi dan Cakupan Imunisasi

Tabel 15. Kepemilikan Kartu Imunisasi

Karakteristik	Memiliki Kartu Imunisasi*	Mendapat Imunisasi Lengkap
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	98.23	68.81
Perempuan	95.40	68.10
Lampung Tengah	96.79	68.45

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Sebanyak 96.79 persen balita di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kartu imunisasi. Balita yang mendapat imunisasi lengkap di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 68.45 persen. Balita berjenis kelamin laki-laki paling banyak mendapat imunisasi lengkap dan juga memiliki kartu imunisasi paling banyak dibandingkan balita berjenis kelamin perempuan.

Tabel 16. Jenis Imunisasi yang Diperoleh

Karakteristik	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/MMR	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	93.03	91.01	93.77	79.79	87.54
Perempuan	96.62	91.41	93.64	82.33	90.50
Kelompok Pengeluaran					

40 Persen Terbawah	93.78	90.15	92.36	83.03	87.36
40 Persen Tengah	96.08	92.92	94.84	80.17	92.20
20 Persen Teratas	95.19	90.06	95.19	76.86	86.05
Pendidikan Tertinggi KRT					
SD ke bawah	90.98	87.17	90.90	74.39	86.66
SMP ke atas	97.44	93.90	95.56	85.54	90.64
Lampung Tengah	94.86	91.21	93.70	81.09	89.05

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Sebanyak 94.86 persen balita sudah mendapat imunisasi BCG. Persentase jenis imunisasi BCG paling tinggi diberikan dibandingkan jenis lainnya. Lalu 91.21 persen balita sudah mendapat imunisasi campak, kemudian balita yang mendapat imunisasi polio sebesar 93.70 persen, serta pemberian imunisasi campak dan Hepatitis B persentasenya masing-masing 81.09 persen dan 89.05 persen.

9. Imunisasi Tetanus Toxoid pada Ibu Hamil

Tabel 17. Jumlah Pemberian Imunitas Tetanus Toxoid

Uraian	Jumlah
Imunisasi Tetanus Toxoid pada ibu hamil	470

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Imunisasi tetanus toxoid merupakan proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan infeksi tetanus pada bayi baru lahir. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan dari infeksi tetanus yang ditimbulkan. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan imunisasi tetanus toxoid di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 470 orang.

10. Pemberian zat besi Ibu Hamil

Tabel 18. Pemberian Tablet Zat Besi

Uraian	Jumlah
Ibu hamil mendapat tablet Fe1	8155
Ibu hamil mendapat tablet Fe3	13689

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Ibu hamil yang diberikan tablet zat besi Fe1 jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah tablet Fe3. Ibu hamil yang mendapat tablet Fe1 sebesar 8155 sedangkan ibu hamil yang diberi tablet Fe3 sebanyak 13689.

11. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Tabel 19. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Lampung Tengah

Uraian	Jumlah
Poskesdes/Polindes	200
Puskesmas	39
Puskesmas melaksanakan P4K	39
Puskesmas melaksanakan GSI	0
Puskesmas perawatan	10
Puskesmas PKRT	2
Puskesmas melaksanakan kelas ibu	39
Puskesmas mampu PPTkP	23
Puskesmas yang KB sesuai standar	38
Rumah tunggu kelahiran	2
RS pemerintah	1
RS swasta	8
RS mampu ponek	9
RS PPT/PKT	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Jumlah poskesdes atau polindes yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 200 unit. Puskesmas yang dimiliki jumlahnya sebanyak 39 unit dan semua puskesmas sudah memiliki fasilitas P4K, GSI, KB standar, dan kelas ibu. Ada juga puskesmas yang sudah memiliki fasilitas PPTKP, PKRT, serta fasilitas perawatan. Terdapat juga rumah kelahiran yang masih belum banyak yaitu sebanyak 2 unit saja.

Tabel 20. Jumlah Tenaga Kesehatan

Uraian	Jumlah
Tenaga medis	130
Dokter gigi	14
Dokter umum	88
Dokter obgin	16
Dokter spesialis anak	6
Dokter spesialis anestesi	6
Bidan	955

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Jumlah bidan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 955 orang yang tersebar di 28 kecamatan. Tenaga medis yang tercatat sebanyak 130 orang dan dokter umum sebanyak 88 orang. Keberadaan dokter spesialis di Lampung Tengah masih sedikit hal ini terlihat dari data tabel diatas bahwa dokter spesialis kandungan (obgin) sebanyak 16 orang. Dokter spesialis anak dan anestesi masih sangat sedikit yaitu masing-masing sebanyak 6 orang.

D. DATA GENDER BIDANG HUKUM DAN HAM

Jaminan perlindungan dan keadilan merupakan hak setiap warga negara, tidak memandang laki-laki ataupun perempuan. Hukum tidak hanya berupa peraturan semata, tetapi juga sebuah sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Diperlukan membangun hukum yang berkeadilan gender, pengintegrasian perspektif gender, serta mengintegrasikan perspektif dari kebutuhan terbaik bagi anak untuk memenuhi hak-haknya. (KemenPPA, 2016)

Dalam kondisi masyarakat saat ini, kekerasan masih menjadi masalah utama dan beberapa pandangan kelompok tertentu bahwa perempuan masih dianggap belum setara dengan laki-laki. Adanya pandangan ketidaksetaraan gender ini dibuktikan dengan laporan kekerasan di beberapa daerah.

1. Jumlah Korban Kekerasan Seksual

Tabel 21. Jumlah Korban Kekerasan Seksual

Uraian	L	P	Jumlah
Jumlah korban kekerasan anak (< 18 tahun)	22	171	193
Jumlah korban kekerasan remaja (12-25 tahun)	11	82	93
Jumlah korban kekerasan dewasa (25 tahun ke atas)			

Sumber : Data LPPA KPA

Jumlah korban kekerasan masih banyak dialami oleh anak berusia kurang dari 18 tahun. Jumlah korban kekerasan remaja

sebanyak 93 dan anak berjenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami kekerasan dibanding anak laki-laki.

2. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban

Tabel 22. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban

Uraian	L	P	Jumlah
Korban kekerasan fisik/KDRT			
Korban kekerasan seksual	2	124	126
Korban kekerasan trafficking			
Korban kekerasan ekonomi			

Sumber : Data LPPA KPA

Korban kekerasan seksual banyak dialami oleh anak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 126 orang. Untuk data korban kekerasan yang lain data masih belum tersedia.

3. Jenis Pelayanan yang Diterima Korban

Tabel 23. Jenis Pelayanan yang Diterima Korban

Uraian	L	P	Jumlah
Pengaduan	15	112	127
Medis/Visum	4	82	86
Bantuan hukum	8	73	81
Rehabilitasi	20	21	41
Pengampingan	15	97	112
Reintegrasi	6	10	16

Sumber : Data LPPA KPA

Korban kekerasan banyak melakukan pengaduan yaitu total sebanyak 127 orang. Pengampingan jumlah terbanyak kedua yang paling banyak dilakukan oleh korban yaitu sebanyak 112 orang.

4. Pendidikan Pelaku Kekerasan

Tabel 24. Pendidikan Pelaku Kekerasan

Uraian	L	P	Jumlah
Tidak sekolah	9	0	9
SD sederajat	13	0	13
SMP sederajat	25	1	26
SMA sederajat	5	0	5
Diploma S1/S2/S3			

Sumber : Data LPPA KPA

Pelaku kekerasan paling banyak berpendidikan SMP sederajat sedangkan pendidikan SMA sederajat jumlah pelaku kekerasan paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka makin sedikit jumlah pelaku kekerasan.

5. Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban

Tabel 25. Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban

Uraian	L	P	Jumlah
Suami/istri			
Keluarga/kerabat	12	0	12
Pacar	36	0	36
Teman	15	0	15
Orang lain Tetangga			

Sumber : Data LPPA KPA

Hubungan korban dengan pelaku kekerasan paling banyak hubungannya sebagai pacar yaitu 36 orang. Dari tabel diatas sebanyak 63 orang pelaku kekerasan berjenis kelamin laki-laki

merupakan pelaku kekerasan yang terbanyak yang sering melakukan kekerasan terhadap kekasih/keluarga/kerabat/teman.

6. Pendidikan Korban Kekerasan

Tabel 26. Pendidikan Korban Kekerasan

Uraian	L	P	Jumlah
Tidak sekolah	14	40	54
SD sederajat	4	23	27
SMP sederajat	12	64	76
SMA sederajat	0	11	11
S1/S2/S3			

Sumber : Data LPPA KPA

Korban kekerasan yang berpendidikan SMP sederajat paling banyak jumlahnya yaitu 76 orang. Anak yang tidak bersekolah paling banyak mengalami korban kekerasan sebanyak 54 orang, jumlahnya terbanyak kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh oleh korban kekerasan tidak berpengaruh, maka dapat disimpulkan semua orang bisa mengalami korban kekerasan.

7. Jumlah Korban Kekerasan Seksual

Tabel 27. Jumlah Korban Kekerasan Seksual

Uraian	L	P	Jumlah
Jumlah korban kekerasan anak (< 18 tahun)	22	171	193
Jumlah korban kekerasan remaja (12-25 tahun)	11	82	93
Jumlah korban kekerasan dewasa (25 tahun ke atas)			

Sumber : Data LPPA KPA

Jumlah korban kekerasan masih banyak dialami oleh anak berusia kurang dari 18 tahun. Jumlah korban kekerasan remaja sebanyak 93 dan anak berjenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami kekerasan dibanding anak laki-laki.

8. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban

Tabel 28. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban

Uraian	L	P	Jumlah
Korban kekerasan fisik/KDRT			
Korban kekerasan seksual	2	124	126
Korban kekerasan trafficking			
Korban kekerasan ekonomi			

Sumber : Data LPPA KPA

Korban kekerasan seksual banyak dialami oleh anak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 126 orang. Untuk data korban kekerasan yang lain data masih belum tersedia.

9. Jenis Pelayanan yang Diterima Korban

Tabel 29. Jenis Pelayanan yang Diterima Korban

Uraian	L	P	Jumlah
Pengaduan	15	112	127
Medis/Visum	4	82	86
Bantuan hukum	8	73	81
Rehabilitasi	20	21	41
Pengampungan	15	97	112
Reintegrasi	6	10	16

Sumber : Data LPPA KPA

Korban kekerasan banyak melakukan pengaduan yaitu total sebanyak 127 orang. Pengampungan jumlah terbanyak kedua yang paling banyak dilakukan oleh korban yaitu sebanyak 112 orang.

10. Pendidikan Pelaku Kekerasan

Tabel 30. Pendidikan Pelaku Kekerasan

Uraian	L	P	Jumlah
Tidak sekolah	9	0	9
SD sederajat	13	0	13
SMP sederajat	25	1	26
SMA sederajat	5	0	5
Diploma S1/S2/S3			

Sumber : Data LPPA KPA

Pelaku kekerasan paling banyak berpendidikan SMP sederajat sedangkan pendidikan SMA sederajat jumlah pelaku kekerasan paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka makin sedikit jumlah pelaku kekerasan.

11. Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban

Tabel 31. Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban

Uraian	L	P	Jumlah
Suami/istri			
Keluarga/kerabat	12	0	12
Pacar	36	0	36
Teman	15	0	15
Orang lain			
Tetangga			

Sumber : Data LPPA KPA

Hubungan korban dengan pelaku kekerasan paling banyak hubungannya sebagai pacar yaitu 36 orang. Dari tabel diatas sebanyak 63 orang pelaku kekerasan berjenis kelamin laki-laki merupakan pelaku kekerasan yang terbanyak yang sering melakukan kekerasan terhadap kekasih/keluaga/kerabat/teman.

12. Pendidikan Korban Kekerasan

Tabel 32. Pendidikan Korban Kekerasan

Uraian	L	P	Jumlah
Tidak sekolah	14	40	54
SD sederajat	4	23	27
SMP sederajat	12	64	76
SMA sederajat	0	11	11
S1/S2/S3			

Sumber : Data LPPA KPA

Korban kekerasan yang berpendidikan SMP sederajat paling banyak jumlahnya yaitu 76 orang. Anak yang tidak bersekolah paling banyak mengalami korban kekerasan sebanyak 54 orang, jumlahnya terbanyak kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh oleh korban kekerasan tidak berpengaruh, maka dapat disimpulkan semua orang bisa mengalami korban kekerasan.

E. DATA GENDER BIDANG EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur kinerja pemerintah suatu wilayah atas pembangunan yang sudah dilakukan. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator kesejahteraan suatu masyarakat. Faktor- faktor yang mempengaruhi

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam yang tersedia (SDA), faktor sosial budaya, hingga perkembangan teknologi.

Kesetaraan gender juga sejalan berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Perempuan yang memiliki pekerjaan ataupun pendapatan sendiri akan dapat menopang hidup dirinya sendiri serta keluarganya. Kegiatan konsumsi yang dilakukan juga turut meningkatkan daya beli yang nantinya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender juga mendorong peran perempuan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Kesempatan lapangan kerja yang luas juga diperlukan untuk meningkatkan peran perempuan saat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

Di Kabupaten Lampung Tengah dalam hal kebutuhan pencari kerja pada tahun 2021 tertinggi ada di pencari kerja yang berpendidikan SMA sederajat sebesar 1,384 orang diikuti pendidikan S1/S2/S3 sebesar 380 orang. Sedangkan yang terendah justru yang berpendidikan Diploma sebesar 37 orang. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat pencari kerja laki-laki sebesar 1 200 orang lebih besar dari perempuan yang sebesar 911 orang.

Tabel 33. Jumlah Pencari Kerja Kabupaten Lampung Tengah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2021

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD Sederajat	34	49	82
SMP Sederajat	144	83	227
SMA Sederajat	785	599	1 384

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Diploma	16	21	37
S1/S2/S3	221	159	380
Jumlah	1 200	911	2 111

Sumber: Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi

Tabel 34. Jumlah Pelaku dan Pekerja IMKM Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pelaku	2 854	720	3 574
Pekerja	34 349	2 702	37 051

Jika kita melihat Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2021 terlihat bahwa jumlah pelaku IMKM sebanyak 3,574 orang dan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 37,051 orang. Jika dilihat menurut jenis kelamin, laki-laki baik sebagai pelaku maupun sebagai pekerja lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 35. Jumlah Pengurus dan Anggota Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pengurus	620	633	1 253
Anggota	34 723	22 844	57 567

Keberadaan koperasi di masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Tengah sangat penting sebagai salah satu penunjang

kegiatan perekonomian. Pada tahun 2021, jumlah pengurus koperasi sebanyak 620 laki-laki dan 633 perempuan. Disini terlihat bahwa jumlah pengurus koperasi perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengurus laki-laki. Sedangkan jumlah anggota koperasi sebanyak 57,567 orang dengan rincian sebanyak 34,723 adalah laki-laki dan 22,844 adalah perempuan.

Sementara itu, keberadaan kelompok tani di masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting di masyarakat dalam membantu menyerap hasil pertanian dari para petani. Jika dilihat dari tabel 36 di bawah. Pada tahun 2021, di sektor pertanian, terlihat bahwa jumlah anggota kelompok tani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 198,340 orang dengan rincian 175,323 adalah laki-laki dan 23,017 adalah perempuan. Sementara jumlah Petugas Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 212 orang dengan rincian 139 orang adalah laki-laki dan 73 orang adalah perempuan.

Tabel 36. Jumlah Anggota Kelompok Tani dan PPL Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Anggota	175 323	23 017	198 340
PPL	139	73	212

Tabel 37. Jumlah Petani Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Petani	1 304	185	1 489
Peternak	3 612	946	4 558

Dari tabel 37 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah petani perkebunan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1,489 orang dengan rincian 1,304 orang adalah laki-laki dan 185 orang adalah perempuan. Sedangkan jumlah peternak sebanyak 4,558 orang dengan rincian sebanyak 3,612 orang adalah laki-laki dan 946 orang adalah perempuan.

Di setiap kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah telah dibentuk beberapa kelembagaan yang bertujuan untuk membantu Aparat Kampung dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Kampung. Dari tabel 38 dibawah terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang menjadi pengurus kelembagaan masih didominasi laki-laki kecuali anggota PKK yang memang masih didominasi oleh perempuan, jumlah ketua RW atau dusun sebanyak 1,880 orang dengan rincian sebanyak 1,811 adalah laki-laki dan 69 adalah perempuan. Sedangkan jumlah ketua RT sebanyak 6,634 orang dengan rincian 6,368 orang adalah laki-laki dan 266 orang adalah perempuan, sedangkan yang menjadi anggota PKK sebanyak 7 170 orang dengan rincian 162 orang adalah laki-laki dan 7,008 orang adalah perempuan.

Tabel 38. Jumlah Pengurus Kelembagaan Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin, 2021

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Ketua RW/Dusun	1 811	69	1 880
Ketua RT	6 368	266	6 634
Anggota PKK	162	7 008	7 170
Anggota Karang Taruna	4 960	1 299	6 259
Anggota Lembaga Adat	1 350	96	1 446

Sumber: Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah

Untuk anggota karang taruna sebanyak 6,259 orang dengan rincian 4,960 orang adalah laki-laki dan 1,299 orang adalah perempuan. Sedangkan jumlah anggota adat sebanyak 1,446 orang dengan rincian sebanyak 1,350 orang adalah laki-laki dan 96 orang adalah perempuan.

Sementara jika dilihat pada tabel 39 di bawah, pada tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah jumlah pengurus partai politik sebanyak 386 orang dengan rincian sebanyak 252 orang adalah laki laki dan 134 orang adalah perempuan. Jumlah anggota dewan sebanyak 50 orang dengan rincian 45 orang laki laki dan 5 orang perempuan.

Tabel 39. Jumlah Pengurus Partai dan Anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pengurus Partai	252	134	386
Anggota Dewan	45	5	50

Tabel 40. Jumlah Penyandang Disabilitas, Pemulung, Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Penyandang Disabilitas	723	733	1 456
Pemulung	48	15	63
Korban Bencana Alam	594	654	1 248
Korban Bencana Sosial	200	182	382

Sementara itu dari tabel 40. diatas terlihat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1,456 orang dengan rincian 723 orang laki laki dan 733 orang perempuan. Jumlah pemulung yang terdaftar sebanyak 48 orang laki laki dan 15 orang perempuan. Sedang yang menjadi korban bencana alam sebanyak 1,248 orang dengan rincian 594 orang laki-laki dan 654 orang perempuan. Yang korban bencana sosial sebanyak 382 orang dengan rincian 200 orang laki laki dan 182 orang perempuan.

F. DATA GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Perempuan ikut juga mengambil bagian dalam politik dan pemerintahan. Pada tabel 41 dibawah, pada tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah jumlah pengurus partai politik sebanyak 386 orang dengan rincian sebanyak 252 orang adalah laki laki dan 134 orang adalah perempuan. Jumlah anggota dewan sebanyak 50 orang dengan rincian 45 orang laki laki dan 5 orang perempuan.

Tabel 41. Jumlah Pengurus Partai dan Anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah menurut Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pengurus Partai	252	134	386
Anggota Dewan	45	5	50

Tabel 42. Rekapitulasi PNS Lampung Tengah Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin, 2021

Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
II a	1	0	1
II b	39	2	41
III a	72	11	83
III b	104	48	152
IV a	378	226	604
IV b	73	45	118
Non Eselon	3 819	5 382	9 201
JUMLAH	4 486	5 714	10 200

Sementara itu, untuk PNS yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah seluruh pejabat eselon baik itu eselon 1, 2,3 dan 4 lebih banyak dijabat laki laki jika dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan jumlah yang tidak menjabat lebih banyak perempuan (5,382 orang) dibandingkan laki laki (3,819 orang).

Namun secara keseluruhan jumlah pegawai lebih banyak perempuan yang sebanyak 5,714 orang (56 persen) dibandingkan dengan laki laki yang sebanyak 4,486 orang (44 persen).

G. DATA GENDER BIDANG SOSIAL DAN MASYARAKAT

Perbandingan jumlah pria dan wanita yang hampir sama tidak serta merta menjadikan peran dan keterlibatan pria dan wanita dalam kehidupan sosial di masyarakat memiliki porsi yang sama. Masalah tentang kesetaraan gender masih merupakan masalah khusus yang tidak dipahami secara luas oleh masyarakat.

Dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial-budaya, perempuan memiliki peran yang lebih rendah daripada laki-laki. Sebagai contoh, Lampung Tengah bisa kita lihat bagaimana keterlibatan perempuan masih sangat rendah (hanya sekitar 10 persen atau 5 kursi dari 50 total kursi di parlemen).

Tabel 43. Jumlah Anggota DPRD Menurut Parpol dan Jenis Kelamin

NO	PARTAI POLITIK	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PDIP	9	2	11
2	GOLKAR	8	1	9
3	PKB	5	1	6
4	NASDEM	6	0	6
5	GERINDRA	6	0	6
6	DEMOKRAT	5	0	5
7	PKS	5	0	5
8	PAN	1	0	1
9	PPI	0	1	1
TOTAL		45	5	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Lampung Tengah

Dalam sistem reproduksi sosial, pasar tenaga kerja, keuangan, dan pembangunan terkait budaya beberapa daerah di Indonesia, juga masih menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki atau selalu dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Tidak dapat dipungkiri, inklusifitas gender dalam sosial budaya membuat ketidakadilan dalam kehidupan sosial budaya akhirnya muncul kepermukaan. Baik laki-laki dan perempuan merasa terintimidasi dengan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya.

Nilai-nilai itu contohnya, laki-laki sebagai kepala keluarga memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sementara perempuan mengurus rumah tangga. Munculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan gender oleh aktivis-aktivis perempuan kemudian dipandang sebelah mata oleh beberapa orang yang tidak memahami konsep gender sebenarnya, bahkan dari kaum perempuan lain yang tumbuh besar dalam lingkungan yang konservatif.

Kita juga bisa melihat bagaimana peran perempuan dari berbagai bidang khususnya Administrasi pemerintah terkini, dimana 31.48 persen saja pegawai Kabupaten Lampung Tengah adalah perempuan (3,424 pegawai) dan pegawai pria sejumlah 6,019 pegawai.

Tabel 44. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	27699	5025	32724
Fungsional Umum	1433	674	2107
Strutural	656	320	976
TOTAL	29788	6019	35807

Dari 301 Kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, 18 perempuan atau 6 persen, di level kecamatan pun, jabatan camat yang diduduki oleh perempuan hanya 3 kecamatan (10.7 persen) dari 28 kecamatan yang ada.

Laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan konservatif yang selama ini merasa memiliki peran penting sebagai pengambil keputusan dalam budaya masyarakat Indonesia kemudian melihat gerakan-gerakan kesetaraan gender sebagai perlawanan perempuan yang tidak seharusnya muncul.

Padahal, gender tidak harus dilihat dari sisi perempuan sebagai pihak yang meminta dan menginginkan “kesetaraan” sementara laki-laki sebagai pemberi “kesetaraan”.

Gender dalam kehidupan sosial budaya harus dilihat dari peran masing-masing dalam membangun nilai-nilai yang setara. Setara dalam mendapatkan kesempatan dan setara dalam mendapatkan penghargaan. Jika isu gender masih dilihat dari sisi yang konservatif, maka selamanya kesetaraan gender akan menjadi angan-angan dan perjuangan sepihak perempuan sebagai

yang merasa terintimidasi dalam aturan-aturan dan nilai-nilai budaya.

H. DATA TERPILAH ANAK

Untuk membedakan kinerja kelompok dewasa dan anak-anak, perlu ditetapkan definisi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan umur anak di Indonesia memiliki rujukan yang bersifat berbeda-beda (Khoiriah 2019) antara lain:

- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, SIM yang punya ketentuan batas minimum usia lebih tinggi seperti usia 20 tahun untuk SIM B1 dan SIM A Umum, usia 21 tahun untuk SIM B II, usia 22 tahun untuk SIM B1 Umum, dan usia 23 tahun untuk SIM B II Umum.;
- Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Karena perbedaan kategorisasi inilah definisi anak akan disesuaikan dengan tema/pokok bahasan yang akan di bahas.

Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak anak terdiri atas 5(lima) kluster kebutuhan hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

1. Klaster Hak Sipil dan kebebasan

Hak sipil dan kebebasan bagi anak meliputi hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekpresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati Nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak akses informasi yang layak serta hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus

mempunyai nama serta kewarganegaraan. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia oleh Indonesia pada tahun 1990.

Akta kelahiran merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki nasab kepada orang tuanya sesuai yang tercantum didalamnya.

Terkait hak identitas bagi anak di Kabupaten Lampung Tengah disajikan melalui data kepemilikan akta kelahiran pada kategori usia 0-18 tahun

Kepemilikan akta lahir di seluruh kecamatan Lampung Tengah berjumlah 432114 jiwa dengan angka kepemilikan akta kelahiran paling banyak di Kecamatan Terbanggi Besar.sebanyak 40.301 jiwa, Hal ini dikarenakan Terbanggi memiliki jumlah penduduk paling besar diantara kecamatan lainnya, seluruh penduduk usia 0-18 tahun sudah memiliki akta kelahiran.

Penelitian yang dilakukan oleh Gumilang dan Amin (2016) dapat memberikan gambaran apa saja factor-faktor tang menyebabkan masyarakat tidak membuat penyebab penduduk tidak memiliki akta lahir antara lain:

- 1) Faktor kesadaran yang masih rendah terkait pentingnya kepemilikan akta lahir;
- 2) Faktor administrasi, yaitu masyarakat masih terbebani dengan syarat administrasi juga waktu khusus untuk mengurusnya.

- 3) Faktor biaya transportasi untuk sampai ke Ibu Kota Kabupaten membutuhkan dana yang cukup lumayan untuk masyarakat desa.
- 4) Faktor keterbatasan akses yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan dinas kependudukan catatan sipil.

Penelitian Gumilang & Amin (2016) dan Abdullah et al (2018) meski dilakukan di daerah lain, namun pada konteks kewilayahan memiliki karakteristik yang kesamaan dengan Kabupaten Lampung Tengah yang juga memiliki wilayah administrasi yang luas.

Selama ini pembuatan akte kelahiran diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 yang direvisi menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam beberapa pasal UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui system setelsel aktif penduduk.

Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akte kelahiran. Beberapa pasal juga mengatur keharusan agar setiap warga negara melaporkan kelahirannya sampai sanksi denda bagi siapa yang melanggar (Iskandar 2014). Rendahnya kepemilikan akte kelahiran perkecamatan bisa dilihat di tabel 45 berikut.

Tabel 45. Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Lampung Tengah

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		
		JML PENDUDUK	MEMILIKI AKTE	%
1	KALIREJO	74.142	33.015	44,53
2	BANGUN REJO	68.867	30.946	44,94
3	PADANG RATU	57.113	26.763	46,86
4	GUNUNG SUGIH	75.956	34.079	44,87
5	TRIMURJO	55.933	22.444	40,13
6	PUNGGUR	41.169	18.088	43,94
7	TERBANGGI BESAR	124.151	56.405	45,43
8	SEPUTIH RAMAN	51.646	21.131	40,92
9	RUMBIA	39.955	16.604	41,56
10	SEPUTIH BANYAK	50.082	20.933	41,80
11	SEPUTIH MATARAM	55.290	23.506	42,51
12	SEPUTIH SURABAYA	51.109	20.509	40,13
13	TERUSAN NUNYAI	54.007	23.240	43,03
14	BUMI RATU NUBAN	34.571	15.825	45,78
15	BEKRI	30.368	13.444	44,27
16	SEPUTIH AGUNG	56.108	24.948	44,46
17	WAY PENGUBUAN	45.898	20.695	45,09
18	BANDAR MATARAM	77.599	33.398	43,04
19	PUBIAN	49.898	22.852	45,80
20	SELAGAI LINGGA	37.187	16.780	45,12
21	ANAK TUHA	44.914	20.921	46,58
22	SENDANG AGUNG	42.908	20.235	47,16
23	KOTA GAJAH	35.724	15.504	43,40
24	BUMI NABUNG	36.678	15.672	42,73
25	WAY SEPUTIH	20.211	8.938	44,22
26	BANDAR SURABAYA	39.395	17.842	45,29
27	ANAK RATU AJI	19.065	8.247	43,26
28	PUTRA RUMBIA	21.739	9.527	43,82

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Tengah

2. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain meliputi perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, Lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.

Isu lain pada kluster Kesehatan anak dan kesejahteraan adalah pernikahan anak. Menimbang perbedaan batas usia anak dalam hukum Indonesia dan ketersediaan sebaran data, penulis mendefinisikan usia pertama nikah kurang dari sama dengan 21 tahun. Berdasarkan data pada grafik trend pada seluruh kecamatan bahwa perempuan usia lebih dari 21 tahun. lebih banyak dari laki-laki usia kurang dari 21 tahun.

Indeks paritas gender 2.36 yang berarti terdapat kesenjangan gender kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat panti asuhan anak yang tersebar di 21 kecamatan, meski tidak semua kecamatan memilikinya. Kalirejo memiliki panti asuhan paling banyak, yaitu 6 buah, diikuti oleh Seputih Agung yang memiliki 6 panti, dan Terbanggi Besar, Seputih Mataram serta Bandar Surabaya dengan tiga buah panti asuhan anak.

3. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Isu pada kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak antara lain ; persalinan di fasilitas layanan Kesehatan, prevalensi gizi balita, cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia

dibawah 2 tahun. Fasilitas pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah anak, rumah tangga dan akses air minum dan sanitasi yang layak dan ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok.

Secara umum angka kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi, kematian neonatal 50 persen terjadi pada bayi berat lahir rendah (BBLR).

Dan lebih dari 50 persen kematian bayi adalah neonatal dini (Abdullah et al 2012). Kebanyakan kematian bayi lahir prematur, kelahiran prematur disebabkan aktivitas ibu hamil yang berat serta kurangnya nutrisi pada ibu hamil, ibu mengkonsumsi obat, kandungan lemah, hamil kembar dan informasi yang didapat saat pelayanan antenatal yang diberikan oleh tenaga Kesehatan (bidan dan dokter) tidak jelas dan kurang lengkap.

Data Tahun 2021 menunjukkan terdapat 16 kasus gizi buruk dan 3125 kurang gizi di Kabupaten Lampung Tengah. Kasus gizi buruk anak ditemukan sejumlah kasus dengan terbanyak kasus di Kecamatan Pubian 3 kasus. Dan semuanya adalah jenis kelamin perempuan semua. (Dinas Kesehatan)

Kasus-kasus ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah melalui pelayanan yang diberikan kepada balita-balita dengan kasus gizi buruk.

Tabel 46. Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2021 per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA GIZI BURUK		
		L	P	JML
1	KALIREJO	0	0	0
2	BANGUN REJO	0	0	0
3	PADANG RATU	1	1	2
4	GUNUNG SUGIH	0	2	2
5	TRIMURJO	2	1	3
6	PUNGGUR	0	0	0
7	TERBANGGI BESAR	0	0	0
8	SEPUTIH RAMAN	0	1	1
9	RUMBIA	0	0	0
10	SEPUTIH BANYAK	0	0	0
11	SEPUTIH MATARAM	0	0	0
12	SEPUTIH SURABAYA	0	0	0
13	TERUSAN NUNYAI	0	0	0
14	SENDANG AGUNG	0	0	0
15	SELAGAI LINGGA	0	1	1
16	PUBIAN	3	0	3
17	ANAK TUHA	0	0	0
18	BUMI RATU NUBAN	0	0	0
19	BEKRI	0	0	0
20	KOTA GAJAH	0	1	1
21	WAY PENGUBUAN	1	0	1
22	SEPUTIH AGUNG	0	0	0
23	BUMI NABUNG	1	0	1
24	WAY SEPUTIH	0	0	0
25	BANDAR MATARAM	0	0	0
26	BANDAR SURABAYA	1	0	1
27	ANAK RATU AJI	0	0	0
28	PUTRA RUMBIA	0	0	0
TOTAL		9	7	16

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Ada beberapa hal-hal yang bisa menjadi faktor penyebab kasus balita dengan gizi buruk dan gizi kurang belum mendapatkan perawatan, antara lain kurangnya pengetahuan dan kesadaran

orang tua bahwa anaknya mengalami gizi buruk dan gizi kurang sejak dini.

Selain kematian bayi, isu yang juga penting pada kluster ini adalah status gizi pada bayi isu pada status gizi anak adalah gizi buruk. Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis.

Anak dengan gizi buruk biasanya mengalami perkembangan mental yang buruk hingga berujung prestasi tidak optimal. Kondisi kekurangan asupan energi (kalori) seperti karbohidrat dan protein. Sering dialami balita usia 0-2 tahun yang tidak mendapatkan cukup ASI dan makanan lainnya.

Pada anak-anak, kurang gizi bisa menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik, berat badan kurang, serta *stunting*. Sementara itu, kelebihan gizi, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, bisa menyebabkan terjadinya obesitas.

Dalam Jurnal Media Medika Dewi Novitasari (2012) menyebutkan bahwa penyebab gizi buruk adalah status sosial ekonomi, ketidaktahuan Ibu tentang pemberian gizi yang baik untuk anak, dan berat badan lahir rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur tahun 2005 menunjukkan bahwa terdapat hubungan status ekonomi, pendidikan ibu, pengetahuan ibu dalam monitoring

pertumbuhan, perhatian dari ibu, pemberian ASI, kelengkapan imunisasi, dan asupan makanan balita dengan kejadian gizi buruk.

Rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dalam keluarga, yang selanjutnya mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang merupakan penyebab langsung dari kekurangan gizi pada anak balita.

Selain pendidikan, pemberian ASI dan kelengkapan imunisasi juga memiliki hubungan yang bermakna dengan gizi buruk karena ASI dan imunisasi memberikan zat kekebalan kepada balita sehingga balita tersebut menjadi tidak rentan terhadap penyakit. Balita yang sehat tidak akan kehilangan nafsu makan sehingga status gizi tetap terjaga baik.

5. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan budaya.

Pada kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini dapat diwujudkan melalui Pendidikan pengembangan anak usia dini holistik dan integrasi (PAUD-HI) wajib belajar 12 tahun. Sekolah Ramah Anak serta tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi yang ramah anak.

Pendidikan anak usia dini tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak. Pendidikan anak usia dini sepatutnya juga mencakup seluruh proses stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Artinya, pendidikan anak usia dini dapat berlangsung dimana saja dan

kapan saja seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang harus diupayakan demi memperbaiki mutu masyarakat Indonesia. Ada beberapa temuan menarik di dalam laporan Worldbank 2020 mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Salah satunya ialah adanya paradoks bahwa meskipun perempuan Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan (tingkat partisipasi pendidikan tinggi), hal itu tidak berlanjut dengan tingginya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Artinya, meskipun partisipasi gender

dalam pendidikan tinggi, kesetaraan gender belum dicapai sepenuhnya.

Laporan tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa hal ini terkait erat dengan norma dan praktik yang berlaku di dalam masyarakat mengenai peran laki-laki dan perempuan sehingga memengaruhi kesempatan perempuan terkait pendidikan, profesi, dan akses terhadap infrastruktur. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesetaraan gender, di antaranya usia pernikahan yang terlalu dini serta pembagian tanggung jawab mengasuh anak yang tidak seimbang. Laporan tersebut juga menyebutkan faktor struktural seperti banyak perempuan bekerja di sektor informal dan kegiatan ekonomi yang produktivitasnya rendah. Beberapa rujukan data untuk melihat tingkat Pendidikan satu wilayah adalah Angka melek huruf, angka partisipasi sekolah.

Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai melalui tiga hal, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan (*right to education*), hak dalam proses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender (*right within education*), dan hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkeadilan.

Di Lampung Tengah pelaksanaan PAUD masih terkesan eksklusif dan baru menjangkau sebagian kecil masyarakat. Meskipun berbagai program perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini usia (0-6 tahun) telah dilaksanakan di Indonesia sejak lama, namun hingga tahun 2000 menunjukkan anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan perawatan dan pendidikan masih rendah.

Data tahun 2001 menunjukkan bahwa anak usia 0-6 tahun yang telah memperoleh layanan pendidikan dini sebesar 22,88 persen di level PAUD, dan 69,43 persen mengikuti pendidikan pra-sekolah di TK, dan mengikuti Pendidikan Raudhatul Atfal (7,69 persen).

Masih rendahnya layanan pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini saat ini antara lain disebabkan masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dini jika dibanding dengan jumlah anak usia 0-6 tahun yang seharusnya memperoleh layanan tersebut.

Berbagai program yang ada baik langsung (melalui Bina Keluarga Balita dan Posyandu) yang telah ditempuh selama ini ternyata belum memberikan layanan secara utuh, belum bersinergi dan belum terintegrasi pelayanannya antara aspek pendidikan, kesehatan dan gizi. Padahal ketiga aspek tersebut sangat menentukan tingkat intelektualitas, kecerdasan dan tumbuh kembang anak.

Ada empat pertimbangan pokok pentingnya pendidikan anak usia dini, yaitu: (1) menyiapkan tenaga manusia yang berkualitas, (2) mendorong percepatan perputaran ekonomi dan rendahnya biaya sosial karena tingginya produktivitas kerja dan daya tahan, (3) meningkatkan pemerataan dalam kehidupan masyarakat, (4) menolong para orang tua dan anak-anak.

6. Kluster Perlindungan khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. PP itu merupakan turunan untuk

melaksanakan ketentuan pasal 71C, undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak

Dalam aturan itu tercantum daftar anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dimana terdapat 15 kategori anak yang wajib mendapat perlindungan dari negara, antara lain:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV dan AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kondisi terkini jumlah anak yang perlu mendapat perlindungan yang dilaporkan di kantor PPA tahun 2020 dan 2021 terdapat 6 kategori saja dan lebih lengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Jumlah kekerasan anak usia kurang 18 tahun, sejumlah 14 kasus, dan terbanyak kasus pada anak perempuan (92 persen). Sedangkan kekerasan pada anak usia 18-25 tahun terdapat jumlah kekerasan yang banyak sejumlah 81 kasus, terdiri dari 8 kasus laki-laki dan 73 kasus pada remaja perempuan.

Tabel 47. Jumlah Kekerasan Anak Usia Kurang dari 18 Tahun, dan Jumlah Kekerasan Anak Usia 18-25 Tahun Kabupaten Lampung Tengah, 2021.

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEKERASAN ANAK (USIA KURANG DARU 18 TAHUN)			JML KEKERASAN ANAK (USIA 18-25 TAHUN)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	KALIREJO			0			0
2	BANGUN REJO			0		2	2
3	PADANG RATU		2	2			0
4	GUNUNG SUGIH			0	1	3	4
5	TRIMURJO			0		5	5
6	PUNGGUR			0	1	8	9
7	TERBANGGI BESAR		5	5	2	18	20
8	SEPUTIH RAMAN			0		3	3
9	RUMBIA			0			0
10	SEPUTIH BANYAK			0		2	2
11	SEPUTIH MATARAM		1	1		3	3
12	SEPUTIH SURABAYA			0		1	1
13	TERUSAN NUNYAI			0	1	6	7
14	SENDANG AGUNG		1	1		2	2
15	SELAGAI LINGGA		1	1		5	5
16	PUBIAN			0			0
17	ANAK TUHA			0		2	2
18	BUMI RATU NUBAN	1		1		1	1
19	BEKRI			0		3	3
20	KOTA GAJAH			0		1	1

Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEKERASAN ANAK (USIA KURANG DARU 18 TAHUN)			JML KEKERASAN ANAK (USIA 18-25 TAHUN)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
21	WAY PENGUBUAN		1	1			0
22	SEPUTIH AGUNG		1	1	3	7	10
23	BUMI NABUNG			0			0
24	WAY SEPUTIH			0			0
25	BANDAR MATARAM		1	1			0
26	BANDAR SURABAYA			0			0
27	ANAK RATU AJI			0			0
28	PUTRA RUMBIA			0		1	1
TOTAL		1	13	14	8	73	81

Sumber: UPTD Dinas P3A Kabupaten Lampung Tengah

BAB III.

PENUTUP

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian baik berupa kasus, gejala maupun dampak dari suatu keadaan yang mengarah pada ketidaksetaraan gender. Semuanya dituangkan dalam bidang-bidang pembangunan sebagai berikut ini:

1. **Aspek Kependudukan.** Potensi bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Indonesia secara umum harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh stakeholder yang ada. Diperlukan usaha untuk memaksimalkan potensi agar fase bonus demografi dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. fase ini dapat dikatakan “bonus” ketika jumlah usia produktif yang lebih banyak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika jumlah usia produktif yang banyak tidak membawa manfaat maka fase tersebut hanyalah berupa perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan umur. Salah satu cara untuk memaksimalkan potensi bonus demografi yaitu dengan menerapkan konsep *human capital* atau modal manusia.

“*Human capital* itu adalah kunci bagaimana gabungan antara pengetahuan dan *skill* yang dimiliki seseorang dapat memberikan nilai di dalam pertumbuhan ekonomi,”

2. **Aspek Pendidikan.** Pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan, optimalisasi penggunaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), dan peningkatan mutu kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dapat menjadi jembatan pemanfaatan bonus demografi. Selain Pendidikan formal, Pemerintah Daerah harus membuka peluang Pendidikan informal (kursus) untuk menambah skill lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Selain itu juga optimalisasi bursa kerja khusus dalam menyalurkan lulusan SMK pada dunia usaha/dunia industri. Hasil analisis atau kajian menunjukkan bahwa pengangguran di tingkat pendidikan SMK tergolong tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, salah satu penyebabnya adalah kesulitan dalam memperoleh pekerjaan sehingga perlu dilakukan pengoptimalan Bursa Kerja Khusus sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyalurkan lulusan ke Dunia Usaha/Dunia Industri.

3. **Aspek Kesehatan.** Angka Kematian ibu dan bayi yang masih terjadi di Kabupaten Lampung Tengah selayaknya menjadi perhatian khusus oleh dinas terkait. Penguatan Puskesmas dan jaringannya; penguatan manajemen program dan sistem rujukannya; meningkatkan peran serta masyarakat; kerjasama dan kemitraan. Strategi penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual

(IMS) dan HIV/AIDS; dan mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular.

4. **Aspek Ekonomi dan Ketenagakerjaan.** Perempuan yang terlibat pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan seringkali tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang berdampak pada tidak dibayarnya upah terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan, Pelatihan, pendampingan dan bantuan permodalan usaha mikro kecil dan menengah/usaha dagang/Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dimiliki oleh perempuan masih rendah. Untuk itu diperlukan intervensi khusus dari dinas terkait agar usaha perempuan mendapat porsi yang sama dalam akses pelatihan, pendampingan dan permodalan.
5. **Aspek Sumber Daya Aparatur Negara.** Potensi Pegawai Negeri Sipil perempuan untuk menjadi top level manajemen sangat besar, karena PNS perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun kenyataannya pejabat eselon III dan IV didominasi oleh laki-laki. Dibutuhkan intervensi khusus dalam membuka peluang PNS perempuan untuk ikut pelatihan, pengembangan diri, studi banding dan ujian kompetensi yang lain sehingga memiliki peluang yang sama untuk menjadi top level manajemen
6. **Aspek Tindak Kekerasan.** Korban adalah perempuan dan anak, untuk itu diperlukan pengetahuan dan kesadaran Bersama bahwa apa yang dianggap kebiasaan dalam masyarakat (memukul istri /anak) merupakan Tindakan melanggar hukum. Penyadaran ini tidak hanya diberikan

kepada pelaku (dalam hal ini laki-laki) namun juga pada perempuan dan masyarakat. Karena budaya yang dianut Sebagian besar masyarakat, bahwa Tindakan kekerasan dari suami/kepala rumah tangga adalah hal yang tabu untuk dibicarakan pada public.

7. **Aspek Hak Anak.** Hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Tanggung jawab pemenuhan hak-hak ini juga ada dimasyarakat. Tim penulis merekomendasikan keterpaduan Gerakan dan kebijakan dengan kerangka Kabupaten Layak Anak dan Pembentukan Forum anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Andi Zulkifli, M. Furqaan Naeim, Nurul Ulmy Mahmud 2012. "Faktor Resiko Kematian Neonatal Dini di rumah sakit bersalin". Kesmas National Public Health Journal vol.6 No.6 Juni 2012 DOI: <http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.V6i6.83>
- BPS, 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah
- Gumilang, B.T & Amin, R.M (2016). JOM FISIP. 3(2), 1-10
- KemenPPA, 2016. HUKUM YANG BERKEADILAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER. (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/438/hukum-yang-berkeadilan-untuk-mewujudkan-kesetaraan-gender>)
- MediaIndonesia,(<https://mediaindonesia.com/opini/476069/kese-araan-gender-dalam-pendidikan>)
- WHO, 2021. Infografis, Indonesia: Gender dan Kesehatan. (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/gender-dan-kesehatan-indonesia.pdf?sfvrsn=a78948fc_5)